

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peranan yang sangat penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu di desain dengan paradigma yang dapat mengembangkan kelas sebagai *democratic laboratory*, yang dapat menanamkan, melatih, dan mensosialisasikan kepada peserta didik tentang konsep demokrasi. Karena salah satu keunikan dan keunggulan sebuah sekolah adalah memiliki budaya sekolah yang kokoh dan tetap eksis. Perpaduan semua unsur baik siswa, guru dan orang tua yang berkerjasama dalam menciptakan komunitas yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, menjadikan sebuah sekolah unggul dan favorit di masyarakat. Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya

manusia yang dapat berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak.

Siswa dapat belajar hidup berdemokrasi di dalam lingkungan sekolah, karna pengembangan ini sangat penting di dapat oleh siswa karena budaya demokrasi adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan berpolitik. Di dalam kegiatan ini siswa harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik yang ada di sekolah. Contohnya seperti dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.

Proses belajar mengajar disekolah bukan semata-mata untuk pendidikan intelektual saja, melainkan pula mengembangkan konsep demokrasi, membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan kemampuan akal nya didalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejalan dengan pendapat tersebut maka salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan konsep demokrasi adalah dilingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa, berilmu, bermoral dan memiliki konsep demokrasi.

Menurut Henry Broughton yang dikutip dalam. (Zamroni,2014: 46), Mengatakan Untuk melakukan pendidikan demokrasi diperlukan dua syarat, yaitu:

1. Kultur sekolah yang demokrasi yang mengilhami nilai-nilai, cita-cita, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Sekolah merupakan laboratorium masyarakat demokrasi atau sebuah *mini society*.
2. Kurikulum sekolah yang demokrasi terutama ilmu-ilmu sosial yang memadai untuk mengembangkan demokrasi.

Pernyataan tersebut sesuai pertimbangan bahwa demokrasi sebagai wacana dan praktis serta tuntutan reformasi yang tengah berlangsung, serta perlunya mewujudkan demokratisasi belajar dilingkungan sekolah terutama dengan pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang menggunakan paradigma konstruktivistik dan semangat demokratisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pendidikan yang mampu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial serta menjadi warga negara yang baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional, sebagaimana selama ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan tetapi dipelajari dan dialami, oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama, tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik.

Demokrasi dipelihara oleh warga Negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan karakter yang dibutuhkan, tanpa adanya

komitmen yang benar dari warga negara terhadap konsep demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas tidak mungkin terwujud, oleh karena itu tugas dari para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota *civil society* lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya PPKn kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.

Namun yang menjadi masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat yang memenuhi muatan tatanan nilai agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-hari belum memenuhi harapan seperti yang diinginkan.

Konsep demokrasi membutuhkan orang-orang atau masyarakat demokrasi yaitu masyarakat yang memiliki dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya, dalam arti memiliki sikap dan perilaku demokrasi, sikap dan perilaku demokrasi itu tidak tumbuh dengan sendirinya juga tidak dapat begitu saja diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Namun sikap dan perilaku demokrasi harus ditanamkan, diajarkan, dan disosialisasikan kepada generasi muda, salah satunya melalui sekolah sebagai tempat belajar berdemokrasi. Untuk selanjutnya dipraktikan dan diamalkan dalam kehidupan bersama sehingga kepribadian demokrasi yang tercermin dalam sikap dan perilaku demokrasi akan terbentuk dilingkungan sekolah, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penelitian di fokuskan terhadap“ **Analisis Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi**

Melalui Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 18 Medan Tahun Pelajaran 2017/2018”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep demokrasi dalam pembelajaran PPKn, yaitu :

1. Rendahnya pendidikan demokrasi
2. Kurang pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Rendahnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
4. Kurangnya penerapan konsep demokrasi melalui pembelajaran PPKn di sekolah.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2005:301) dimana beliau mengatakan bahwa: “Pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak diteliti”.

Dalam upaya mengkaji permasalahan diatas, terdapat banyak masalah yang terdefinisi agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas oleh sebab itu

penelitian ini di fokuskan pada analisis pemahaman siswa tentang konsep demokrasi melalui Pembelajaran PPKn di sekolah.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemahaman siswa tentang konsep demokrasi melalui pembelajaran PPKn?
2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman siswa mengenai konsep demokrasi dalam lingkungan sekolah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman siswa mengenai konsep demokrasi dalam pembelajaran PPKn
2. Untuk melihat perbedaan pemahaman siswa mengenai konsep demokrasi dalam lingkungan sekolah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau keilmuan maupun praktis atau empiris. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam mengembangkan salah satu

mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu inovasi pembelajaran PPKn.

b. Praktis

1. Diketuainya perbedaan peningkatan konsep demokrasi siswa yang ada dalam lingkungan sekolah..
2. Diketuainya pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran demokrasi dengan peningkatan konsep demokrasi siswa.
3. Diketuainya pengaruh yang signifikan antara pengembangan materi pembelajaran PPKndengan materi konsep demokrasi siswa.
4. Diketuainya respon guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran demokrasi dengan mengembangkan materi pembelajaran PPKn.